

Infrastruktur Berbasis Masyarakat Bidik 325.200 Tenaga Kerja

JAKARTA, ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah alokasi program padat karya atau infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) pada tahun anggaran 2025 menjadi Rp 6,89 triliun yang diharapkan menciptakan 325.200 tenaga kerja.

Oleh Heru Febrianto

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan kementerannya mendapatkan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 116,22 triliun, yang terdiri dari nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) tahun 2025 sebesar Rp 75,63 triliun dan penambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 40,59 triliun.

“Tambahkan anggaran 2025 sebesar Rp 40,59 triliun diantaranya untuk pemanfaatan revitalisasi sekolah sebesar Rp 19,5 triliun, keberlanjutan pembangunan IKN Rp 9,11 triliun dan penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi,” kata Basuki dalam Rapat Kerja (raker) Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Dalam kesempatan tersebut, kata Basuki, Kementerian PUPR juga menambah alokasi program padat karya atau infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) tahun anggaran 2025. Alokasinya ditambah sebesar Rp 4 triliun yakni menjadi Rp 6,89 triliun dari alokasi sebelumnya sebesar Rp 2,8 triliun. Dengan penambahan alokasi tersebut diharapkan menciptakan sebanyak 325.200 tenaga kerja dari masyarakat.

“Menindaklanjuti usulan dan masukan dari Komisi V DPR RI pada reker sebelumnya, terdapat perubahan rencana program padat karya atau infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) tahun anggaran 2025 menjadi Rp 6,89 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 2,8 triliun,” jelas Basuki.

Adapun penambahan alokasi program padat karya tersebut, menurut Basuki, diantaranya akan digunakan untuk sektor sumber daya air sebesar Rp 2,7 triliun yang diharapkan bisa menyerap 180.000 tenaga kerja. Salah satunya melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) menjadi 12.000 lokasi dari 2.000 lokasi.

“Untuk sektor jalan dan jembatan sebesar Rp 1,35 triliun diharapkan bisa menyerap tenaga kerja 24.600 orang melalui program rutin jalan dan jembatan,” imbuhnya.

Pada sektor permukiman dialokasikan sebesar Rp 2,10 triliun yang diharap bisa menghasilkan 53.200 tenaga kerja. Sejumlah programnya yakni Sanimas menjadi 1.546 lokasi dari semula hanya di 400 lokasi, untuk PISEW semula 631 lokasi menjadi 892 lokasi, Pamsimas menjadi 594 lokasi dari sebelumnya 500 lokasi dan TPS3R menjadi 100 lokasi, termasuk dukungan untuk kemiskinan ekstrem.

“Untuk sektor perumahan dilokasikan sebesar Rp 750 miliar dan diharapkan mencetak 68.000 tenaga kerja. Sedangkan programnya yakni pembangunan rumah swadaya skema BPS pada

Pagu Anggaran Kementerian PUPR 2025	
Unit (eselon)	Alokasi anggaran
Sekretariat Jenderal	Rp 528,44 miliar
Inspektorat Jenderal	Rp 98,91 miliar
Ditjen Sumber Daya Air	Rp 38,43 triliun
Ditjen Bina Marga	Rp 37,41 triliun
Ditjen Cipta Karya	Rp 33,82 triliun
Ditjen Perumahan	Rp 4,78 triliun
Ditjen Bina Konstruksi	Rp 558,36 miliar
Ditjen Pembiayaan Infrastruktur	Rp 148,96 miliar
BPIW	Rp 92,79 miliar
BPSDM	Rp 347,32 miliar
Total	Rp 116,22 triliun

Sumber: Kementerian PUPR

program padat karya semula 20.528 untuk menjadi 34.289 unit,” paparnya.

Anggaran IKN Rp 9,11 T

Pada raker tersebut, kata Basuki, Kementerian PUPR mengalokasikan Rp 9,11 triliun untuk keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari tambahan anggaran 2025 sebesar Rp 40,59 triliun.

Basuki mengatakan, sesuai penyampaian hasil pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) APBN TA 2025, dan Surat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan tanggal 11 September 2024 tentang Perubahan Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga TA 2025 Hasil Kesepakatan Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN TA 2025, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun.

“Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun,” ujarnya. Keberlanjutan pembangunan IKN merupakan program non Quick-Win. Alokasi bagi keberlanjutan pembangunan IKN tersebut diperuntukkan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Dirten Perumahan.

Untuk bidang Bina Marga, program non Quick-Win ini untuk penangan jalan akses dan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk pemenuhan akses perumahan, peningkatan jalan Kawasan West Residence, Precinct Core dan Sumbu Tripura, Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), Hankam dan Lingkarp Sepaku 4, Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, dan Sisi Timur Tahap 2.

“Kemudian pembangunan Jalan Lingkarp Sepaku Tahap 2, Jalan Feeder (Distrik) di Kawasan IKN, Seksi 6C-1 Simpang 3 ITCI-Simpang 1B-Sumbu Kebangsaan Timur KIPP, dan Pengawasan Teknik 5 Kegiatan,” kata Basuki.

Lalu Pemenuhan Sebagian Kebutuhan Pembangunan Bandara VVIP (Sisi Landasan

Sedangkan pada bidang Perumahan diperuntukkan bagi lanjutan penuntasan pembangunan 47 Tower Rumah Susun (Rusun) ASN dan Hankam.

Fokus Pembangunan Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi V Boyman Harun mengingatkan Kementerian PUPR agar benar-benar memberikan perhatian pada pembangunan di daerah-daerah yang membutuhkan.

“Saya hanya berharap kepada Pak Menteri beserta jajaran, agar penambahan ini benar-benar diberikan kepada daerah-daerah yang membutuhkan, termasuk usulan-usulan yang disampaikan Anggota DPR Komisi V,” kata Boyman.

Boyman menambahkan, pembangunan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi Kementerian PUPR dengan adanya penambahan anggaran tersebut. Terutama, sekolah-sekolah di desa-desa yang memiliki kondisi yang memprihatinkan.

“Semoga dengan ada tambahan Rp 40 triliun ini, fasilitas-fasilitas umum yang sifatnya pendidikan seperti sekolah-sekolah agar menjadi prioritas utama diberikan anggaran tersebut,” harap Politisi Fraksi PAN tersebut.

Sementara itu, terhadap kinerja di tahun 2024, Boyman mengingatkan Kementerian PUPR untuk segera menyelesaikan program-program yang belum rampung. Seperti, jembatan gantung di Kalimantan Barat, hingga proyek abrasi pengaman pantai yang masih menunggu penyesuaian anggaran untuk pelelangan.

“Tolong secepatnya anggaran tersebut dikucurkan sehingga pelaksanaan pembangunannya bisa dilaksanakan untuk tahun 2024,” pinta Legislator Dapil Kalimantan Barat I ini.



Bali International Airshow 2024

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kanan) bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kiri) dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono (kiri) menandatangani pembukaan Bali International Airshow 2024 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Rabu (18/9/2024). Acara pembukaan pameran Bali Airshow dihadiri hampir 1.000 peserta pameran, diantaranya termasuk pejabat pertahanan, menteri, dan pemimpin industri dari lebih dari 20 negara, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Timor Leste, Korea Selatan, Australia, India, Amerika Serikat, Jepang, Selandia Baru, Tiongkok, Papua Nugini, dan Turki. Acara ini juga ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LOI) Bali International Airshow antara Kemenko Marves, Kemenhub, Kemenparekraf, Kemhan, InJourney, TNI AU, dan PT Inaro Tujuh Belas.

Kereta Cepat Whoosh Terdampak Gempa Magnitudo Bandung

JAKARTA, ID – Pengelola Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Whoosh mengantisipasi kejadian gempa bumi yang terjadi pada Rabu (18/9) pukul 09.41 WIB dengan kekuatan 5 skala richter di titik lokasi di Kabupaten Bandung, berdekatan dengan lokasi jalur kereta cepat Whoosh.

PT KCIC menyampaikan permohonan maaf atas pembatalan sejumlah perjalanan dimana gempa terjadi berulang hingga delapan kali dengan kekuatan beragam sesuai informasi yang disampaikan oleh BMKG.

“Sesuai SOP Keselamatan dan Keamanan Tim Kerja KCIC langsung melakukan pemeriksaan menggunakan *rail car* atau kereta perawatan,” ungkap Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunnisa di Jakarta, Rabu (18/09/2024).

la menuturkan, KCIC melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk semua jalur sepanjang 144 kilometer (km) dengan kondisi jalur yang sebagian besar melalui area perbukitan.

“Pada saat kejadian sistem pendeteksi gempa yang terpasang di jalur rel dan sarana Whoosh berfungsi dengan baik, getaran bahkan terdeteksi hingga wilayah Karawang,” ungkap Eva.

Pemeriksaan menyeluruh dilakukan untuk semua jalur sepanjang 144 km dengan kondisi jalur yang sebagian besar melalui area perbukitan, adapun area pemeriksaan meliputi struktur jembatan dengan total panjang 82 km, 13

terowongan dengan total panjang 17 km serta alur kereta api (KA) diatas tanah sepanjang 42 km.

Berdasarkan pantauan awal di OCC (Operation Control Center) Tegalluar atas semua sensor yang terpasang dan visualisasi dari pantauan 1.399 CCTV yang tersebar di semua jalur, sampai dengan saat ini tidak terlihat kerusakan di prasarana jalur kereta cepat Whoosh.

Pantauan terkini diprogramkan kereta dapat mulai berjalan pada pukul 15.00 WIB. Secara total terdapat 16 perjalanan kereta Whoosh yang dibatalkan dengan relasi 8 perjalanan relasi Halim - Tegalluar dan 8 perjalanan lainnya relasi Tegalluar - Halim.

“Untuk masyarakat yang sudah membeli tiket dan terdampak pembatalan jadwal dapat melakukan proses pembatalan dengan bea tiket yang akan dikembalikan 100% dengan jangka waktu pengembalian maksimal 1x24 jam sejak proses pembatalan dilakukan,” jelasnya.

Pembatalan, juga bisa dilakukan hingga 3 hari setelah jadwal keberangkatan, pengguna yang tidak menunggu disarankan dapat melanjutkan perjalanannya menggunakan moda lain dan melakukan proses pembatalan di hari selanjutnya.

“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai perjalanan dan promo Whoosh, silakan menghubungi *customer service* di Stasiun atau Contact Center KCIC,” pungkas Eva. (ich)



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BANK SINARMAS Tbk.

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT. Bank Sinarmas Tbk. (“Perseroan”) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari **Senin, 28 Oktober 2024** (“Tanggal Penyelenggaraan Rapat”).

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka dengan ini disampaikan bahwa:

- Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System KSEI* (“eASY.KSEI”) yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
- Pemanggilan beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan melalui surat kabar harian yang berperedaran nasional, situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia (“Bursa”), dan situs web KSEI (termasuk aplikasi eASY.KSEI) pada hari **Jumat, 4 Oktober 2024** (“Tanggal Pemanggilan Rapat”);
- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efeknya terdaftar di Penitipan Kolektif KSEI pada hari **Kamis, 3 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB (recording date)**;
- Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan mengenai mata acara rapat dapat diusulkan jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari **Jumat, 27 September 2024 pukul 16.00 WIB**;
- Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan :
 - menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau
 - memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak lainnya, baik dengan Surat Kuasa konvensional (formulir kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan pada Tanggal Pemanggilan Rapat) atau dengan surat kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI yang tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Penyelenggaraan Rapat pukul **13.00 WIB**.

Informasi detail terkait mata acara dan pelaksanaan Rapat akan diformasikan lebih lanjut bersama dengan Pemanggilan Rapat.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan (www.banksinarmas.com), situs web Bursa (www.idx.co.id), dan situs web KSEI (www.ksei.co.id).

Jakarta, 19 September 2024
PT. Bank Sinarmas Tbk.
Direksi Perseroan



sinarmas multiartha

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk (Perseroan)

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) (untuk selanjutnya disebut Rapat) di Jakarta pada hari **Senin, tanggal 28 Oktober 2024**.

Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, serta memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15), pemanggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 1 (satu) Surat Kabar harian, situs web Perseroan www.smma.co.id dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web eASY.KSEI pada hari **Jumat, tanggal 4 Oktober 2024**.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Kamis, tanggal 3 Oktober 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Usulan Para Pemegang Saham dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada hari **Jumat, tanggal 27 September 2024**.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu **Jumat, tanggal 25 Oktober 2024**.

Jakarta, 19 September 2024
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Direksi Perseroan